

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pernyataan	
Lembar Pengesahan	
Abstrak.....	i
<i>Abstract</i> .....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PROSES BUKTI AWAL TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>21</b>
A. Hukum Acara Pidana Tindak Pidana Korupsi.....	21
1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan.....	21
2. Mekanisme Bukti Awal Yang Cukup.....	28
3. Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.....	29
4. Tindakan-tindakan Selama Proses Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	33
B. Tindak Pidana Korupsi.....	38
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Korupsi.....	38
2. Perumusan Delik Tindak Pidana Korupsi.....	47
3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	57

4. Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....62
5. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi.....65

**BAB III HASIL TEMUAN BPK REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PEKERJAAN JALAN SEBAGAI BUKTI AWAL TINDAK PIDANA KORUPSI.....69**

A. Peran BPK .....69

1. Tugas dan Wewenang BPK Dalam Pemeriksaan Keuangan Institusi.....69
2. Peran BPK Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.....77
3. Proses Temuan BPK Pada Kasus Pekerjaan Jalan Pada Dinas Bina Marga Sumatera Utara.....82

B. Modus Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Jalan.....85

**BAB IV ANALISIS TENTANG HASIL TEMUAN BPK REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PEKERJAAN JALAN SEBAGAI BUKTI AWAL TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....89**

A. Apakah Hasil Temuan BPK Dapat Dikatakan Sebagai Bukti Awal Adanya Tindak Pidana Korupsi.....89

B. Hambatan-Hambatannya Yang Terjadi Dalam Hal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hasil Temuan BPK.....94

C. Penegakan Hukum Terkait Adanya Hasil Temuan BPK Atas Pemeriksaan Jalan Pada Dinas Bina Marga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Serta Upaya Penanggulangannya.....	101
<b>BAB V  PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>